

PENTINGNYA LITERASI PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE TOURISM DI BALI

A.A Bagus Surya¹, Widya Nugraha²
Prodi Hubungan Internasional, Universitas Udayana
Denpasar, Indonesia
Alamat e-mail :

aabasuwinu@unud.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan upaya dari Pemerintah Daerah Bali (Pemda Bali) untuk menanggulangi dampak negatif dari masifnya aktifitas pariwisata dengan menggunakan metode telaah pustaka (library research) dan data sekunder. Penerapan kebijakan bebas visa yang dikeluarkan melalui Perpres No. 21 Tahun 2016 telah memunculkan beberapa dampak negatif yang menyebabkan Bali berada pada kondisi overtourism. Untuk dapat terhindar dari kondisi yang lebih buruk terjadi di masa depan, maka Pemda Bali berupaya untuk merumuskan serangkaian kebijakan penanggulangan untuk meningkatkan literasi pariwisata. Dari sekian kebijakan penanggulangan yang mampu dihasilkan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan beberapa dampak yang ditimbulkan dari aktifitas pariwisata yang masif. Literasi pariwisata termasuk degradasi lingkungan, masalah sampah, pelecehan terhadap tempat suci atau hal-hal yang dianggap sakral oleh masyarakat Bali. Selain itu, permasalahan ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh tidak meratanya aktifitas pariwisata juga telah berusaha ditanggulangi melalui kebijakan di level kabupaten/kota di Bali. Oleh karena itu, demi melancarkan upaya penanggulangan dan pembenahan terkait dampak negatif pariwisata massal ini, Pemda Bali juga menerbitkan serangkaian peraturan daerah yang mampu memberikan panduan kepada para pelaku pariwisata dan pembuat kebijakan pada level kabupaten dan kota se-Bali.

Kata Kunci: Pariwisata massal, Pariwisata Bali, Dampak sosial, Pariwisata berkelanjutan, Kebijakan Bebas Visa, pariwisata berkualitas

Abstract

The aims of this article is to described the efforts of Bali's Local Government on mitigating the negative impacts of mass tourism activity, using library research method and secondary data. The implementation of tourist free visa policy through Presidential Decree (Perpres) No. 21 of 2016 has created several negative impacts that made Bali in overtourism conditions. The Bali's Local Government (Pemda Bali) has attempted a number of efforts and strategies to prevent worsen situation. In the number of polices has been made by The Bali's Local Government, some of it is already capable to handle the problems causing by the massif of torurism activity. Some of the negative impacts caused by the massif tourism activity including environmental degredation, waste problem, and the blasphemy of sacred Balinese hindu's worship places and sites. Furthermore, The problem of economic disparity causing by the imbalance of tourism activity is also has been handle by the local authority of districts and capital city in Bali. Therefore, to succeeding the all efforts, The Bali's local government also supported through govenor's regulations and other local regulations. This several regulations is expecting can addressed the problems and also facilitate the authority within the district and



ISSN (Cetak) 2829-7326
ISSN (Online) 2828-1772

Vol.2, No.1 2022

Diajukan 27 November 2022
Diterima 1 Desember 2022
Diterbitkan 16 Desember 2022

***Penulis korespondensi**
aabasuwinu@unud.ac.id

Sitasi

Nugraha, AA Bagus Surya
Widya (2022)
Pentingnya Literasi Pariwisata
dalam Mewujudkan
Sustainable Tourism di Bali.
JIPKA,
2(1),100-119.

capital city government level. guidelines for the manuscript/article template used in articles published in the Library and Archives Information Journal (JIPKA) are effective for the publication of the October 2021 Edition. The article begins with the article title, author name, author affiliation address, email, followed by an Indonesian abstract and English written in italics (italics) for 150-250 words with a font size of 10 pt and Constantia typeface and one space between lines. The English abstract must be written in good and correct English according to the contents of the Indonesian abstract. The abstract section must contain the core of the problem to be raised, the method of solving it, and the findings obtained.

Keywords: *Mass Tourism, Bali's Tourism, social impact, sustainable tourism, free visa policy, quality tourism*

PENDAHULUAN

Bali merupakan daerah pariwisata yang memiliki reputasi mendunia dan beberapa kali memperoleh pengakuan sebagai tujuan wisata yang terpopuler versi beberapa lembaga survey. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang aneh dikarenakan Bali telah menjadi sebuah brand yang dikenal akan keunikan budaya dan keramahan penduduknya. Dua perpaduan unsur ini juga dilengkapi dengan keindahan alam yang menyatu dengan budaya dan adat istiadat melalui serangkaian ritual yang dilangsungkan hampir setiap harinya. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan Bali sebagai sebuah pulau yang mampu membentuk sinergitas antara alam, manusia dan pariwisata untuk menjadi sebuah komoditi. Antara pariwisata dan masyarakat Bali telah dianggap memiliki hubungan yang saling menguntungkan, karena seperti halnya pariwisata memang dikatakan dapat menimbulkan multiplier effect yang merupakan keuntungan dari pengembangan industri pariwisata. Oleh sebab itulah Presiden Joko Widodo menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar dalam target pencapaian pertumbuhan ekonomi di periode pertama kepemimpinannya.

Demi mewujudkan pencapaian target kunjungan wisatawan asing Presiden Joko Widodo memberlakukan kebijakan bebas visa melalui Perpres No. 21 tahun 2016. Kebijakan ini telah memberikan stimulasi bagi 169 negara untuk berkunjung ke Bali tanpa terhalang permasalahan visa dengan asas timbal balik. Izin tinggal diberikan maksimal selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya (Jazuli, 2016: 212). Menurut mantan Menteri Pariwisata (Menpar) Arif Yahya kebijakan ini sangat penting untuk diberlakukan mengingat jumlah

kunjungan wisatawan asing ke Indonesia ditargetkan sekitar 20 juta dari sebelumnya yang hanya 9.3 juta (Tempo, 2017).

Dari tumbuhnya industri pariwisata, terdapat juga sektor-sektor lain yang mampu digerakkan dan sebenarnya memiliki relasi timbal-balik (reciprocal) dengan pariwisata itu sendiri, diantaranya seperti usaha kecil dan menengah (UKM), sektor pertanian, sektor jasa dan beberapa sektor lainnya. Seperti dikutip dari data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Bali tercatat rasio kewirausahaan hingga akhir Desember 2018 sebesar 8,38 persen atau berada di atas rata-rata nasional 4-5 persen. Dengan kondisi ini terlihat bahwa Bali memiliki iklim usaha yang cukup mendukung pertumbuhan UMKM yang sejalan dengan peningkatan di sektor pariwisata. Pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 326.009 yang tersebar di sembilan kabupaten dan jumlah ini meningkat dari data desember 2017 yang hanya 312.967 atau naik 4 persen. Selain itu, sektor pertanian juga mendapatkan dampak yang positif dari bertumbuhnya pariwisata di Bali. Salah satunya adalah terserapnya produk hasil pertanian dan pengembangan agrowisata sebagai alternatif objek wisata yang beberapa tahun belakangan ini marak berkembang di Bali. Begitu juga dengan sektor jasa, berkembangnya sektor jasa ini terjadi karena permintaan yang terus bertambah dan jenisnya pun bervariasi.

Adanya angka peningkatan di beberapa sektor ini ternyata sejalan dengan yang terjadi pada sektor pariwisata terutama kunjungan jumlah wisatawan asing ke Bali. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali terjadi peningkatan kunjungan wisatawan asing dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sekitar 6 persen setiap tahunnya. Angka ini juga dianggap sebagai salah satu indikator optimisme pencapaian target kunjungan wisatawan nasional yang ditargetkan sekitar 8 juta wisatawan pertahunnya berkunjung ke Bali. Namun, pertumbuhan pariwisata ini juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di Bali. Logika atau pendekatan yang berkembang selama ini dianggap lebih berorientasi kepada pencapaian target atau profit bukan pada pariwisata berkesinambungan yang mampu melindungi Bali. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara disebabkan oleh adanya pemberlakuan kebijakan bebas visa telah menjadikan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang bebas dari halangan apapun untuk 169 negara penerima. Jadi

apabila kita merujuk dari pernyataan Menpar, Bali dengan kondisi yang ada saat ini masih harus mengejar sekitar 1 juta defisit kunjungan wisman pertahunnya dengan acuan data kunjungan sebanyak kurang lebih 7 juta orang di tahun 2019. Dari masifnya ekspansi ini, Bali kemudian menghadapi permasalahan baik langsung maupun tidak langsung diakibatkan dari adanya praktik pariwisata massal atau yang lebih dikenal dengan mass tourism. Beberapa permasalahan seperti alih fungsi lahan, krisis air bersih, sampah plastik dan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) diperparah dengan adanya kondisi pariwisata massal ini.

Permasalahan alih fungsi lahan merupakan isu yang terus meningkat jumlahnya seiring dengan pertumbuhan pariwisata. Hal ini disebabkan oleh penyediaan sarana pendukung pariwisata harus bertambah untuk dapat memberikan daya tampung bagi wisatawan yang datang ke Bali. Selain itu juga, alih fungsi lahan sangat mudah dilakukan oleh pemilik lahan baik dengan menjual atau disewakan karena keuntungan yang diperoleh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mempertahankan sebagai lahan pertanian. Menurut Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali alih fungsi lahan khususnya pertanian di tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.13% dari luas area tanam atau lebih tinggi dari batas yang diatur rencana tata ruang wilayah (Bisnisbali.com, 2022). Angka ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat Bali juga memiliki sistem pengairan sawah yaitu subak yang telah menjadi warisan budaya dunia terancam tidak lagi dapat digunakan. Dalam penerapannya, pariwisata pada prinsipnya bergantung pada sektor pertanian bukan terbalik seperti yang terjadi saat ini sektor pertanian sangat bergantung dengan adanya kegiatan pariwisata. Selain itu juga, bertambahnya jumlah penduduk yang diakibatkan oleh urbanisasi juga memicu pengalih fungsian lahan pertanian untuk kebutuhan tempat tinggal. Hal ini kemudian makin memperburuk situasi dan kondisi lahan pertanian di Bali.

Permasalahan berikutnya yang juga muncul akibat kegiatan pariwisata dan diperparah dengan adanya mass tourism adalah krisis air bersih. Bali diperkirakan mengalami krisis air bersih pada tahun 2020 (Nusabali.com, 2019). Hal ini sangat mungkin terjadi diakibatkan oleh penggunaan sumber air tanah ataupun air permukaan yang sedemikian masif sehingga siklus pengisian kembali air tanah tidak berjalan maksimal. Penggunaan air bersih di sektor pariwisata diperkirakan saat ini 15

kali lipat jika dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga (Bali.idntimes.com,2019). Selain itu juga kondisi ini diperparah dengan adanya limbah buangan hotel atau villa yang tidak semuanya memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan di Bali. Tentu hal ini juga berdampak pada sektor lain seperti pertanian yang juga makin dipersulit dengan tidak tersedia atau minimnya pasokan air untuk kegiatan bertani. Jadi kondisi ini juga kemudian mendesak para pemilik lahan pertanian kemudian memilih untuk mengalihkan lahannya menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan.

Permasalahan alih fungsi lahan dan krisis air ini juga diperparah dengan adanya masalah sampah plastik yang saat ini sudah mencapai tahapan yang mengkhawatirkan. Pariwisata dikatakan sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar bagi tingginya volume sampah yang ada di Bali setiap harinya (Destinasian.co.id, 2019). Pantai-pantai di Bali seperti Sanur, Kuta, Padang Galak dan Masceti pada bulan tertentu diteror dengan adanya sampah terutama sampah plastik dalam jumlah yang besar. Tidak jarang hal ini selain merusak pemandangan juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain di pesisir pantai, kumpulan sampah plastik juga berhasil didokumentasikan oleh seorang wisman di perairan Nusa Penida yang sedang melakukan kegiatan penyelaman. Buruknya kondisi akibat permasalahan sampah plastik ini juga membuat beberapa kelompok pecinta lingkungan mengkampanyekan untuk tidak berlibur ke Bali sebelum masalah ini bisa diatasi. Selain itu, permasalahan sampah plastik di laut juga menimbulkan terjadinya pencemaran mikro plastik yang dapat berdampak pada biota laut dan hal ini berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Dari kondisi-kondisi ini kita dapat melihat bahwa terjadi penurunan kondisi lingkungan dan juga image pariwisata Bali akibat dari tingginya volume sampah yang dihasilkan.

Selain permasalahan lingkungan, masalah keamanan dan ketertiban juga muncul dari perilaku wisman yang berkunjung ke Bali. Beberapa tahun belakangan ini, publik Bali sering dikagetkan dengan berbagai permasalahan gangguan keamanan dan kriminalitas yang melibatkan wisatawan asing (Kompas.com. 2010). Salah satu diantaranya adalah pembobolan ATM ataupun modus pembobolan kartu atm menggunakan cara skimmer di Bali yang dilakukan oleh warga negara asing. Selain itu

masalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh wisman di beberapa tempat hiburan di daerah Kuta, Canggu dan sekitarnya juga menjadi salah satu bentuk gangguan yang harus dihadapi aparat penegak hukum di Bali. Angka gangguan keamanan ini juga diperkirakan akan terus mengalami peningkatan apabila tidak segera diatasi dengan memberikan hukuman tegas bagi para pelakunya. Selain permasalahan kriminal, tindak gangguan keamanan lainnya adalah pelecehan terhadap tempat suci umat hindu yang ada di Bali yang dinilai direspon terlalu lunak (Kompas.com, 2019). Peristiwa pelecehan ini sering kali terjadi yang dilakukan oleh wisman dan viral di media sosial. Aksi pelecehan ini mengundang protes keras dari masyarakat yang menginginkan adanya perlindungan terhadap tempat suci dan edukasi terhadap wisatawan oleh para pelaku industri pariwisata. Hal ini tentu saja memerlukan perhatian yang serius dari aparat maupun pemerintah daerah yang merupakan pelindung dan pengayom masyarakat yang ada di Bali.

Dari serangkaian bentuk dampak yang terjadi, menarik untuk diteliti mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali. Oleh sebab itulah penelitian ini kemudian memfokuskan permasalahan mengenai “Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Bali mewujudkan sustainable tourism pasca dikeluarkannya Perpes No. 21 Tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo?”

KERANGKA ANALISIS

Istilah *mass tourism* merupakan sebuah konsep yang terus mengalami perkembangan sebagai dampak dari adanya perdebatan dan reinterpretasi dari keberadaannya. Pada dasarnya konsep *mass tourism* memiliki pengertian adanya sebuah logika atau pendekatan mengenai bagaimana pariwisata seharusnya dikembangkan. Menurut beberapa peneliti, istilah *mass tourism* juga dapat merujuk pada sebuah kondisi yang terbentuk diakibatkan adanya perilaku pariwisata global yang mengikuti keinginan pasar (standarisasi) demi memaksimalkan keuntungan (Kreag, 200: 3). Namun dari perdebatan yang terjadi, muncul kesepakatan bahwa *tourism* maupun *mass tourism* memiliki serangkaian dampak yang dapat dibagi menjadi dua yaitu positif dan negatif. Terdapat beberapa dampak yang muncul dari kegiatan pariwisata diantaranya adalah ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya, kesemrawutan dan kemacetan, pelayanan, pajak, benturan dengan masyarakat

(Vainikka, 2013: 268). Namun dampak-dampak ini mungkin saja tidak semua muncul atau bahkan dampak lain yang mungkin muncul dikarenakan perbedaan situasi.

Pada dasarnya *mass tourism* lebih menekankan pada situasi yang terjadi diakibatkan dari kebijakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kuantitas wisatawan dan bukan pada kualitasnya. Dengan adanya orientasi ini maka pengelolaan daya tarik pariwisata pun akan lebih berfokus pada produksi massal agar dapat menekan harga. Sudah tentu pariwisata yang murah akan lebih menarik wisatawan dalam jumlah yang relatif lebih banyak, namun hal ini biasanya tidak berbanding lurus dengan kualitasnya. Apabila kita melihat dampak dari adanya dampak negatif yang muncul akibat dari kegiatan pariwisata, maka dengan adanya kondisi *mass tourism* dampak negatifnya juga akan semakin meningkat. Dari kondisi inilah kita dapat melihat bahwa sektor pariwisata di Bali juga sedang mengalami krisis yang diperkirakan akan terus meningkat (Radarbali.jawapos.com,2019). Namun dalam hal ini mencari sebuah solusi untuk dapat mengelola dampak negatif ini juga menjadi sebuah keharusan mengingat pariwisata juga memiliki dampak-dampak positif.

Dibandingkan dengan bentuk industri yang lain, pariwisata dianggap sebagai salah satu bentuk industri yang memiliki dampak negatif relatif lebih kecil. Hal ini juga menjadi pertimbangan banyak negara di dunia untuk berlomba-lomba mengembangkan pariwisatanya untuk menghasilkan pendapatan domestik. Namun seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai keberadaan pariwisata Bali yang semakin hari mengalami serangkaian dampak yang semakin memburuk tentu tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah. Pengelolaan pariwisata yang berbasis pada penanggulangan dampak-dampak yang ditimbulkan juga menjadi penting dalam membentuk strategi kedepannya demi eksistensi dan pariwisata berkelanjutan. Untuk dapat menganalisa mengenai upaya Pemerintah Daerah Bali, dalam penelitian ini akan menggunakan konsep *sustainable tourism* dengan penekanan pada sinergitas pariwisata dengan konservasi lingkungan serta perlindungan terhadap nilai-nilai budaya lokal Bali.

Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah sebuah konsep yang coba ditawarkan untuk dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai pengelolaan pariwisata. Merujuk dari diskusi mengenai konseptualisasi *sustainable tourism* merupakan sebuah konsep yang tidak terlepas dari *sustainable development*. Dari

serangkaian perdebatan dan definisi yang digunakan mengenai *sustainable development*, maka dapat dipahami bahwa pertumbuhan yang terjadi harus berorientasi pada kesinambungan dari pertumbuhan itu sendiri. Dengan arti lain dapat diterjemahkan bahwa pertumbuhan yang terjadi harus mempertimbangkan aspek-aspek yang mampu mendukung *sustainability* (kesinambungan). Dalam konteks pariwisata, pertumbuhan pada sektor ini juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa aspek lainnya seperti ekonomi, sosial dan lingkungan (Sorensson, 2016: 326-327). Sehingga setiap upaya yang dilakukan dalam kerangka pertumbuhan pariwisata Bali harus berorientasi pada ketiga hal tersebut.

Aspek ekonomi dalam membangun pertumbuhan pariwisata berkelanjutan merupakan suatu hal yang penting. Oleh sebab itulah memang pada hakikatnya industri pariwisata berorientasi kepada profit. Namun dalam hal pemerataan ekonomi yang diperoleh dari adanya pertumbuhan pariwisata juga harus terdesentralisasi agar tidak hanya memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu saja. Apabila keuntungan ekonomi tidak terdistribusikan secara merata maka yang terjadi adalah menurunnya kualitas pariwisata. Hal ini dapat terjadi karena para pelaku pariwisata yang didominasi oleh warga lokal akan lebih berusaha mengejar keuntungan sehingga akan mengabaikan kualitas dari pariwisata itu sendiri (Ibid: 329-340). Apabila hal ini terjadi, maka dipastikan lingkungan pariwisata yang terbentuk akan cenderung menurunkan minat kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Hal ini sudah dapat kita lihat dari kondisi penurunan yang terjadi di Bali. Wisatawan terutama wisatawan asing mengeluhkan kondisi Bali yang sudah semakin tidak layak untuk dikunjungi sebagai tempat wisata. Dari kondisi ini lah peran pemerintah dibutuhkan untuk dapat menciptakan kondisi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal Bali.

Dengan adanya pertumbuhan pariwisata dan ekonomi sudah tentu akan membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat di daerah tersebut. Aspek sosial yang dimaksudkan dalam pembentukan pariwisata berkelanjutan adalah bagaimana dalam pembangunan pariwisata juga mampu melindungi hak sosial masyarakat lokal (Ibid:340). Dengan kata lain, dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya eksploitasi pariwisata juga harus dikelola sehingga tidak menjadi bom waktu dikemudian hari. Gesekan antara masyarakat lokal Bali dan wisatawan asing

saat ini sudah mulai sering bermunculan. Hal ini mungkin disebabkan dari perilaku wisman yang dianggap tidak menghargai nilai-nilai lokal sehingga menimbulkan ketersinggungan warga lokal. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat ekonomi saja tidak cukup untuk dapat menghasilkan sebuah kondisi yang kondusif untuk pariwisata. Oleh sebab itu edukasi kepada wisatawan asing juga dibutuhkan untuk dapat meminimalisir kesalahpahaman atau ketidakpedulian wisatawan terhadap kearifan lokal yang ada di Bali.

Dampak selanjutnya yang dapat dirasakan dari sebuah industri pariwisata yang masif adalah permasalahan degradasi lingkungan. Residu dari kegiatan pariwisata yang terjadi akan bermuara ke lingkungan di mana pariwisata itu berkembang. Hal ini tentu bukanlah suatu hal yang bisa dianggap sepele akan akan mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap image pariwisata itu sendiri. Menurut Hoyer dalam Sorensson (2002), pariwisata menyumbang dalam permasalahan lingkungan di destinasi pariwisata tersebut sekitar 40-60% (Ibid: 329). Dari angka tersebut beberapa permasalahan muncul akibat dari polusi, sampah, kesemrawutan dan alih fungsi lahan untuk mendukung akomodasi wisata. Dengan adanya kondisi inilah, dalam pengembangan pariwisata harus juga memperhatikan permasalahan lingkungan yang terdampak dari aktivitas pariwisata itu sendiri. Orientasi kebijakan yang ada khususnya di Bali harus memberikan ruang pada upaya-upaya konservasi lingkungan agar tidak mengalami kerusakan yang lebih parah lagi.

Dari ketiga aspek yang telah dibahas inilah kemudian akan dianalisa bagaimana perkembangan pariwisata di Bali dan upaya penanggulangan dampak negatif yang muncul. Sudah tentu pariwisata yang merupakan sektor andalan bagi pendapatan daerah juga harus tetap berkembang seiring dengan tuntutan yang ada. Namun ketiga aspek (ekonomi, sosial dan lingkungan) harus menjadi landasan dalam setiap pembuatan kebijakannya sebagai sebuah bentuk upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan atau disebut juga dengan *sustainable tourism*.

METODE

Dalam sebuah penelitian, peneliti dihadapkan dengan berbagai macam metode penelitian. Metodologi penelitian diperlukan guna mengarahkan dan menuntun pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai sama dengan realitas. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis dan sifat penelitian yang dilakukan guna

mendapatkan hasil yang tepat pula. Ada beberapa metode yang sering dipergunakan dalam Ilmu Hubungan Internasional antara lain metode kualitatif, metode kuantitatif, serta metode campuran. Pada tulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang dibahas.

Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Bali dalam penanggulangan dampak *mass tourism* yang terjadi akibat dari adanya kebijakan bebas visa melalui Perpes No. 21 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam melakukan penanggulangan dampak negatif dari adanya pariwisata berbasis massal perlu penekanan terhadap konservasi lingkungan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal Bali. Oleh sebab itu analisa lebih ditekankan pada kebijakan Pemerintah Daerah Bali yang juga diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Bali. Untuk dapat meneliti upaya-upaya yang dilakukan digunakan metode studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang didapatkan dari jurnal maupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dokumen resmi yang bersumber dari Pemda Bali juga menjadi acuan untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan pada level kebijakan. Data untuk tulisan ini lebih banyak menggunakan data sekunder yang bersumber dari karya ilmiah sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Setelah itu, obeservasi terhadap data sekunder yang digunakan ditelaah berdasarkan substansi yang dibahas, sehingga akan memunculkan beberapa *cluster* pemikiran yang dapat membantu menjawab rumusan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Buruk Pariwisata Massal Bagi Bali

Aktifitas pariwisata yang selama ini telah menjadi rutinitas di Bali kini menjadi sesuatu yang cenderung berlebihan, hal ini juga sering disebut dengan *overtourism*. *Overtourism* dapat didefinisikan sebagai “pertumbuhan jumlah pengunjung secara berlebihan, sehingga menyebabkan kepadatan di area-area di mana penduduk lokal merasakan konsekuensinya, yaitu perubahan gaya hidup serta akses terhadap fasilitas dan kesejahteraan (Milano dkk., 2018 dalam Dodds dan Butler, 2019: 1). Selain itu konsekuensi lainnya dapat mencakup masalah keberlanjutan budaya, sosial dan

lingkungan daerah pariwisata (Benner, 2019 dalam Capocchi ddk, 2019: 9). *Overtourism* yang dirasakan oleh masyarakat juga dapat menimbulkan gerakan sosial atau aksi protes dari masyarakat daerah tujuan wisata tersebut. Di Eropa Selatan terdapat sebuah jaringan gerakan protes yang disebut sebagai “Network of Southern European Cities against Touristification” atau SET Network yang bertujuan untuk menekan pemerintah dalam upaya mengurangi pertumbuhan pariwisata (Milano dkk., 2018: 5). SET Network mencakup 16 destinasi wisata di Italia, Spanyol, Malta, Portugal dan diperkirakan juga telah menyebar ke beberapa wilayah lainnya di Eropa. Dari hal inilah tidak menutup kemungkinan gelombang resistensi terhadap aktifitas pariwisata yang tidak terkontrol juga bisa terjadi di Bali.

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan ditemukan beberapa data yang menyatakan bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata sudah mengalami *overtourism*. Sebuah travel website Fodor’s Travel dalam Fodor’s No List 2020-nya menyebutkan bahwa Bali sedang berhadapan dengan dampak dari *overtourism*, terutama masalah lingkungan, sehingga tidak disarankan untuk dikunjungi sebagai destinasi pariwisata (Fodor, 2019). Bali sendiri sudah mengumumkan kondisi darurat sampah pada tahun 2017 dengan jumlah sampah per hari dapat mencapai 3.800 ton (Fodor, 2019; The Jakarta Post, 2019). Dalam jurnal judul *The Side Effects of Mass Tourism: The Voices of Bali Islanders*, responden yang merupakan masyarakat Bali mengungkapkan ketidakpuasannya dengan pengelolaan sampah serta polusi air yang terjadi di Bali (Chong, 2020: 165). Selain itu, jurnal yang sama juga menjelaskan tentang *cultural dilution* terjadi terhadap budaya Bali serta perilaku *disrespectful* dan *non-compliance* dari turis-turis terhadap tradisi serta norma sosial di Bali (Chong, 2020: 163). Menurut Ida Bagus Agung Partha Adnyana yang merupakan Ketua Bali Tourism Board, terdapat komodifikasi budaya yang intens dimana banyak Budaya Bali yang diubah untuk keperluan konsumsi pariwisata (Bali Post, 2020). Hal ini juga kemudian terus berlanjut sampai dengan dikeluarkannya peraturan presiden tahun 2016 tentang pembebasan visa bagi beberapa negara yang masuk ke Indonesia dengan tujuan berwisata.

Selain itu, jika dilihat berdasarkan jumlah kamar dan akomodasi sepanjang 2017-2019, terlihat bahwa jumlah total kamar keseluruhan dari bintang 1-4 adalah 3912

unit (BPS, 2019). Lalu, jumlah kunjungan turis pertahun bila dirata-ratakan terhitung dari 2016 (karena 2016 terjadi lonjakan cukup tinggi) sampai 2020 mencapai 4,8 juta wisman (BPS, 2021) (jumlah ini lebih banyak daripada penduduk di provinsi Bali yang hingga 2021 berjumlah 4,3 juta jiwa) (BPS, 2021). Hal ini juga disinyalir disebabkan oleh pemberlakuan pembebasan visa bagi wisatawan dari beberapa negara yang memperoleh hak kekhususan tersebut.

Adapun daerah terpadat dengan wisman adalah kabupaten Gianyar dan Badung mengingat di kedua daerah ini terdapat destinasi wisata terkenal seperti Ubud dan Jimbaran. Ini bisa dilihat dari banyaknya tempat menginap dan akomodasi bagi wisatawan bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Banyaknya tempat menginap mengindikasikan banyaknya kebutuhan wisatawan yang juga berbanding lurus dengan jumlah wisatawan yang datang.

Bila dikaitkan dengan fenomena *overtourism* dan indikatornya maka sebenarnya kepadatan turis melebihi kapasitas yang bisa ditampung tidak terlihat secara kasat mata (maksudnya di beberapa destinasi wisata tidak terlihat kepadatan turis yang menyebabkan sesaknya tempat tersebut), akan tetapi dampak dari ramainya turis yang datang memberi dampak negatif pada lingkungan (polusi, krisis air, beralihnya lahan sawah maupun lahan hijau menjadi pemukiman, villa dan akomodasi pariwisata).

Selain itu, kemudahan akses dan murahya biaya untuk mengeksplere pulau ini menyebabkan turis yang datang berasal dari berbagai kelas, kelas atas (mereka yang berwisata mewah) hingga kelas bawah (para traveller yang ingin wisata murah bahkan tanpa uang). Masuknya turis dari berbagai kalangan ini, menyebabkan wisatawan yang datang tidak terfilter sehingga beberapa dari mereka kurang memiliki sopan santun dan tidak mengikuti norma di daerah setempat, banyak kasus pula di mana wisatawan memiliki konflik dengan masyarakat lokal. Kasus penistaan terhadap tempat-tempat suci, wisman yang beralih menjadi pengemis, fenomena gentrifikasi yang mulai menghantui merupakan beberapa dampak *overtourism* yang terungkap.

Upaya Menanggulangi Dampak Buruk Pariwisata Massal Terhadap Lingkungan.

Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Bali dalam menanggulangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, terlebih dahulu harus diidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk kedalam dampak negatif dari industri pariwisata. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam melihat tindakan Pemerintah Daerah Bali. Perlu di garis bawahi bahwa tidak semua tindakan Pemerintah Daerah Bali yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, dapat dikaitkan sebagai upaya dalam menanggulangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan. Sebagai contoh, upaya Pemerintah Daerah Bali mengenai sistem pertanian organik, penggunaan energi bersih dan lain sebagainya tidak akan dibahas secara mendetil, dikarenakan tidak secara langsung berhubungan dengan dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan.

Berdasarkan Sunlu (2003: 263-270), secara umum dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Menipisnya Sumber Daya Alam
- b. Degradasi Lahan
- c. Peningkatan Polusi
- d. Hilangnya habitat alami flora dan fauna lokal

Di Bali, dapat kita amati bahwa dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan telah terjadi. Salah satu contohnya pada tahun 2019 lalu Bali mengalami kekeringan terpanjang dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, yaitu selama 206 hari (detik.com, 2019). Menurut IDEP Foundation, musim kering yang berkepanjangan ini terjadi dikarenakan telah terjadi eksploitasi air bersih untuk kegiatan pariwisata. Jauh sebelum kekeringan melanda, pasokan air bersih di Bali telah lama terkuras untuk kepentingan pariwisata. Sebesar 65% dari seluruh air bersih di Bali digunakan untuk hotel, kolam renang, dsb.

Sebagai upaya dalam menanggulangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengeluarkan beberapa produk hukum sebagai berikut (Baliprov, 2021):

1. Pergub Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
2. Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

Terkait dengan efektivitas Pergub ini, dalam keterangan tertulisnya kepada Detik (2021), Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan "Pergub Nomor 97 Tahun 2018 sudah berjalan dengan sangat baik, dimana mampu mengurangi sampah plastik di hotel, restoran dan pasar/toko modern hingga ke angka 90 persen sedangkan di pasar tradisional pengurangannya hingga 40 persen."

3. Pergub Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik
4. Pergub Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada Dan Penghijauan
5. Pergub Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Sungai, Mata Air Dan Laut
6. Pergub Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih
7. Pergub Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
8. Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
9. Pergub Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Serta
10. Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali.

Upaya Menanggulangi Dampak Buruk Pariwisata Massal Terhadap Kehidupan Sosial

Salah satu dampak sosial yang ditimbulkan oleh pariwisata adalah komodifikasi budaya. Hal ini dapat mengancam keutuhan dan keluhuran budaya lokal serta nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Salah satu bentuk komodifikasi budaya adalah pementasan tarian sakral sebagai pertunjukan atau hiburan. Tentu saja ini akan merusak nilai yang dimiliki tari-tarian sakral tersebut. Untuk itu, pada tahun 2019 Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bersama dengan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali,

Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan Ketua Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Provinsi Bali membuat Keputusan Bersama Tentang Penguatan dan Perlindungan Tari Sakral Bali. Keputusan bersama ini juga ditandatangani oleh Gubernur Bali sebagai pihak yang mengetahui. Pada intinya keputusan ini melarang segala bentuk pementasan tarian sakral di luar keperluan ritual. Namun, pihak-pihak yang menandatangani tidak secara eksplisit mengaitkan keputusan ini dengan komodifikasi tari sakral untuk pariwisata, baik di dalam isi keputusan ini maupun di dalam pernyataan-pernyataan terkait keputusan ini. Meskipun begitu, melihat poin ketiga keputusan bersama ini, yaitu “melarang semua pihak mempertunjukkan...segala bentuk Tari Sakral Bali di luar tujuan sakral..”, kita dapat menyimpulkan bahwa ada kaitan antara komodifikasi tari sakral dan pariwisata. Oleh karena itu, keputusan ini dapat dilihat sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi dampak sosial pariwisata dalam hal nilai-nilai kebudayaan.

Pada tahun 2015, bersama dengan wakil gubernur bali dan perwakilan dari kementerian pariwisata Republik Indonesia, Yayasan Tri Hita Karana dan UNWTO menandatangani MoU komitmen pelaksanaan Global Code of Ethics For Tourism di Bali. Global Code of Ethics For Tourism (GCET) sendiri merupakan *frame of reference* untuk pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. GCET sendiri ditujukan kepada bagi pemerintah, *travel industry*, masyarakat lokal, serta wisatawan agar dapat memaksimalkan keuntungan pariwisata dan meminimalisir dampak negatif pariwisata bagi lingkungan, budaya, dan masyarakat di seluruh dunia. Selain itu pada tahun 2020, Indonesia menandatangani Framework Convention on Tourism Ethics di Madrid. Menurut UNWTO, Framework Convention on Tourism Ethics sendiri yang merupakan penerus dari GCET memiliki kemampuan mengikat yang lebih besar sehingga diharapkan pada tahap enforcement serta implementasinya nanti lebih efektif baik secara internasional maupun nasional. Hal ini kemudian dijadikan landasan untuk merumuskan pergub dan perda untuk menata pariwisata Bali kedepannya.

Dampak sosial lain dari pariwisata adalah terjadinya kasus-kasus pelecehan tempat suci yang dilakukan oleh wisatawan. Meskipun terlihat sepele, kasus semacam ini membuat masyarakat Bali yang memegang teguh nilai-nilai budaya dan agama

merasa resah. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali membahas peraturan yang mengatur tentang perlindungan pura serta benda-benda suci. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pelecehan terhadap tempat suci, misalnya dengan cara membatasi akses ke pura, di mana tidak semua orang boleh masuk ke semua bagian pura. Peraturan tersebut kemudian disahkan menjadi Pergub No. 25 Tahun 2020 Fasilitas Perlindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan. Selain Pergub tersebut, terdapat Pergub Bali no. 28 tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pariwisata Bali dan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali (Balipost, 2019). Jadi dari pergub maupun perda yang dikeluarkan oleh Pemda Bali terkait upaya menanggulangi dampak negatif dari adanya aktifitas pariwisata telah dilakukan. Namun yang masih perlu ditingkatkan kembali adalah upaya pencegahan di tempat-tempat suci yang disakralkan oleh umat Hindu di Bali agar tidak terjadi lagi perilaku yang melecehkan simbol-simbol keagamaan.

Upaya Menanggulangi Dampak Buruk Pariwisata Masaal Terhadap Sektor Ekonomi

Fenomena *overtourism* di Bali tidak hanya memunculkan dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, boomingnya pariwisata menyebabkan terjadinya ketidakmerataan terutama dari segi lapangan pekerjaan dan pendapatan. Pariwisata di Bali selama ini hanya mampu menguntungkan beberapa daerah tertentu yang dianggap sebagai pusatnya aktifitas pariwisata diantaranya Kabupaten Badung dan Gianyar. Walau demikian, sektor pariwisata tidak selamanya mampu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat setempat. Gianyar salah satu contohnya, kabupaten ini dikenal sebagai salah satu pusat wisata budaya dan kecamatan Ubud merupakan salah satu pusat teramai yang dikunjungi turis, tetapi pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini ternyata belum mampu menyaingi Tabanan yang rata-ratanya mencapai 6,5% (terhitung sejak 2017-2019). Sementara di Tabanan sendiri pariwisata menjadi tema pembangunan kabupaten walaupun destinasi yang dimiliki tidak sebanyak Gianyar dan Badung hal yang sama juga dilakukan oleh kabupaten Buleleng (BPK, 2020). Tren industri pariwisata yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tidak saja memberi dampak positif

bagi masyarakat tetapi tentu juga memberikan dampak negatif, adapun beberapa dampak negative pariwisata bagi ekonomi diantaranya:

1. Masuknya tenaga kerja asing

Dalam sektor pariwisata, masyarakat lokal Bali bekerja sebagai pemberi jasa. Sedangkan posisi atas (manager, hrd, dll) masih didominasi oleh masyarakat luar Bali maupun luar negeri.

2. Terjadinya ketimpangan dan kesenjangan pendapatan di beberapa kelompok masyarakat

Terdapat kesenjangan ekonomi antara Bali Selatan dan Utara. Hampir sebagian besar wisatawan menghabiskan waktunya di Bali Selatan seperti Nusa Dua, Kuta, Canggu, meskipun cukup banyak pula yang mendatangi Ubud.

3. Ketergantungan pada satu sektor, yakni pariwisata.

Upaya yang dilakukan pemerintah Bali dalam menangani dampak negative ini yakni:

a. Pemerintah menjalankan program CSR “Corporate Social Responsibility”

Hal ini diimplementasikan melalui perekrutan tenaga kerja lokal. Melalui Perda Kabupaten Badung Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Pasal 11 menjelaskan tentang penerimaan tenaga kerja lokal. Beberapa hotel menerapkan jumlah sebanyak 30-40% dari total pekerja merupakan tenaga kerja lokal (Sihandarma, 2017:7). Hal ini dapat digolongkan menjadi upaya terhadap **dampak negative poin (1)**.

b. Melakukan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU)

Presiden Jokowi pada 2018 meminta untuk melakukan perancangan guna menambah nilai perekonomian daerah dengan mengembangkan daerah yang mengalami kesenjangan. Pembangunan ini dipandang sebagai suatu langkah untuk meratakan pembangunan di Bali. Adapun harapan ketika bandara ini rampung yakni akan menjadi infrastruktur yang mampu meningkatkan pariwisata di Utara dan mencegah overtourism di Bali Selatan. Hal ini dapat digolongkan menjadi upaya terhadap **dampak negatif poin (2)**.

Sebenarnya upaya untuk memajukan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata telah tertuang dalam misi pembangunan pemerintah provinsi Bali, poin ke-13 dan 14 yang masing-masing berbunyi :

“Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.”

“Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.”(Baliprov, 2019)

Adapun realisasi dari misi ini sudah memenuhi target yang diharapkan, terutama di tahun 2019. Pada tahun 2019 pariwisata Bali mampu mencapai target penuh terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yakni sebesar 45 poin. Sementara itu, sumbangan devisa yang hanya ditargetkan ternyata mampu terealisasi dengan jumlah 19.458.000.

KESIMPULAN

Pasca diberlakukannya perpres yang mengatur mengenai pembebasan visa bagi wisatawan dari beberapa negara di tahun 2016, kepadatan kunjungan berdampak sangat signifikan bagi pariwisata Bali. Dengan adanya peningkatan setiap tahunnya maka akomodasi yang disediakan untuk memenuhi permintaan juga terus bertambah. Hal ini kemudian memperburuk situasi yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sektor pariwisata. Inilah kemudian yang menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Bali dalam merumuskan kebijakan terkait upaya penanggulangan dampak negatif yang diakibatkan dari masifnya aktifitas pariwisata. Beberapa upaya terkait dengan penanggulangan dapat dilihat dari beberapa pergub dan perda yang dikeluarkan guna memberikan dasar hukum untuk melakukan penanggulangan. Adapun pergub maupun perda tersebut telah mencakup sejumlah pembenahan di beberapa sektor seperti lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Namun memang situasi Bali berubah pasca terjadinya pandemi covid 19 yang juga memengaruhi upaya penanggulangan yang dilakukan. Akan tetapi dengan adanya situasi ini penyempurnaan dan pembenahan harus tetap dilakukan.

Selama terjadinya pandemi, Bali justru mengalami kondisi *undertourism* yang disebabkan dari terhentinya kegiatan pariwisata. Tentu hal ini sebenarnya memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali terkait kebijakan sebelumnya yang memang telah menyebabkan Bali berada pada kondisi krisis akibat aktifitas pariwisata. Namun secara keseluruhan, upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah telah terlihat di beberapa pergub dan perda yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten dan kota madya yang ada di Bali. Selain itu, saat ini upaya penanggulangan terhadap masifnya aktifitas pariwisata di saat sebelum terjadinya pandemi dapat disinergikan dengan penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan di setiap daerah tujuan wisata. Pada akhirnya, aktifitas pariwisata Bali memang sebaiknya memiliki perbedaan perlakuan dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia yang masih relatif baru yang bertujuan untuk tetap menjaga kualitas sehingga tidak malah menjadi kontra produktif dan mengakibatkan sejumlah kemunduran serta dampak negatif.

DAFTAR PUSATAKA

- Bali, P. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali*. Denpasar: Pemprov Bali. Retrieved.[diakses melalui <https://www.baliprov.go.id/web/wp-content/uploads/2020/07/LKjIP-PEMERINTAH-PROVINSI-BALI-TAHUN-2019.pdf>]
- BPK. (2020). *BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota*. BPK.[diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/140436/2020perguboo51037lampiran05.pdf>]
- Capocchi, A.; Vallone, C.; Pierotti, M.; Amaduzzi, A. *Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives Sustainability* 2019. 2020. Researchgate
- Chong, Daniel., *The side effects of mass tourism: the voices of Bali islanders*. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*. 25. 157-169. 10.1080/10941665.2019.1683591.
- Dodds, Rachel & Butler, W, Richard., “The Phenomena of Overtourism: a review”, 2019, *International Journal of Tourism Cities*, Researchgate
- Jazuli, Ahmad., “Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian”, *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2016, Hal 212
- Kreag,glenn, “The Impacts of Tourism”, 2001 *Minnesota Sea Grant*, The University of Minnesota, New York
- Milano, Claudio & Cheer, Joseph & Novelli, Marina. *Overtourism a growing global problem*, 2018, Researchgate.

Sihandharma, I.K. Bayu. *Pelaksanaan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) pada Industri Perhotelan di Kuta Selatan*. 2017. OJS Unud

Sunlu, Uğur. "Environmental impacts of tourism." (2003). SemanticScholar. org
Sorensson, Anna, "Sustainable Mass Tourism: Fantasy or Reality?", 2016, The International Journal of Enviromental, Cultural, Economic and Social Sustainability, Vol.7: Issue 5

Vainikka, Vilhelmiina, "Rethinking Mass Tourism", 2013, Sage Publication, Tourist Studies Vol 13: 268

Situs Berita:

Alih fungsi Tetap Ancam Lahan pertanian di Bali, <http://bisnisbali.com/alih-fungsi-tetap-ancam-lahan-pertanian-di-bali/> Menteri Arief Ceritakan Strategi 169 negara Penerima Bebas Visa, <https://binis.tempo.co/read/869856/menteri-arief-ceritakan-strategi-169-negara-penerima-bebas-visa>

Alih Fungsi Lahan Jadi Tantangan Bali Jaga Daya Tahan Pangan <https://bali.bisnis.com/read/20220622/537/1546781/alih-fungsi-lahan-jadi-tantangan-bali-jaga-daya-tahan-pangan>

Gawat, Bali Krisis Air: Defisit Air 18 Meter Kubik/Detik, <https://www.nusabali.com/berita/61452/gawat-bali-krisis-air>

Pariwisata Bali Manfaatkan Air 15 Kali Lebih Besar dari Warga Lokal, <https://bali.idntimes.com/science/experiment/amp/imamrosidin/pariwisata-di-bali-manfaatkan-air-15-kali-lebih-besar-dari-warga-lokal>

Program Ramah Lingkungan Hotel-Hotel di Bali, <https://destinasian.co.id/program-ramah-lingkungan-5-hotel-di-bali>

Banyak Turis Asing di Bali Jadi Penjahat, <https://amp.kompas.com/regional/read/2010/10/13/13065973/banyak.turis.asing.di.Bali.jadi.penjahat-8>

Viral Bule Cuci Alat Vital Pakai Air Suci Bali, Psikolog Nilai Kita Terlalu Lunak, <https://sains.kompas.com/read/2019/08/12/203100023/viral-bule-cuci-alat-vital-pakai-air-suci-bali-psikolog-nilai-kita-terlalu>

Alarm Kunjungan Wisatawan Turun Terburuk Sejak Tiga Tahun Terakhir, <https://www.balipost.com/news/2019/10/17/90162/Jaga-Kesucian-Pura,Disusun-Perda...html>

Jaga Kesucian Pura, Disusun Perda Perlindungan Benda Sakral, <https://bali.antaranews.com/berita/162146/rektor-isi-pelindungan-tari-sakral-perlu-disosialisasikan>

<https://www.isi-dps.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Dok-baru-2019-09-17-16.08.51.pdf>

Fodor's 'No Go' List Discourages Travel To Places Like Bali, Angkor Wat in 2020, <https://www.thejakartapost.com/travel/2019/11/16/fodors-no-go-list-discourages-travel-to-places-like-bali-angkor-wat-in-2020.html>

Ini, 3 Dampak Overtourism Di Bali, <https://www.balipost.com/news/2020/03/09/108513/Ini,3-Dampak-Overtourism-di...html>